

352.135 07

Ren

a

2005

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDRALAYA**



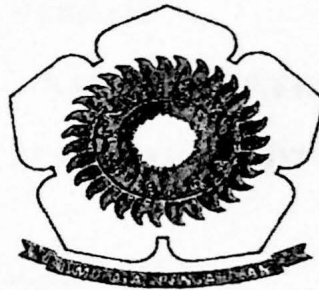
SKRIPSI

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

DI KOTA PALEMBANG

R.12128

12410



Oleh:

DERRY RENDAL

01013120045

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Mencapai Gelar

Sarjana Ekonomi

2005

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

INDRALAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : DERRY RENDAL

N.I.M : 01013120045

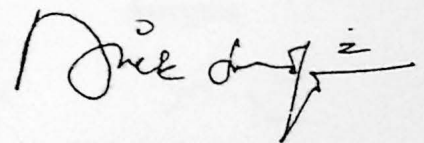
JURUSAN : ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN

MATA KULIAH : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN
DAERAH

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN
RESTORAN DI KOTA PALEMBANG

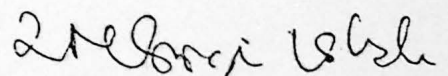
PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI

Tanggal : 02 Februari 2005 KETUA PANITIA :



Dr. Didik Susetvo, M. Si
NIP. 131673869

Tanggal : 02 Februari 2005 ANGGOTA :



Drs. Zulkarnain Ishak, MA
NIP. 130353374

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDRALAYA

SKRIPSI

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
DI KOTA PALEMBANG

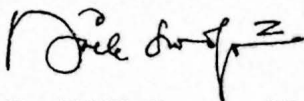
DIAJUKAN OLEH
NAMA : DERRY RENDAL
NIM : 01013120045

Telah dipertahankan di depan panitia ujian komprehensif
Pada tanggal : 11 Februari 2005
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif

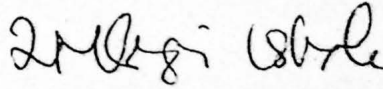
Indralaya, 15 MARET 2005

Ketua



Dr. Didik Susetyo, M. Si
NIP. 131673869

Anggota



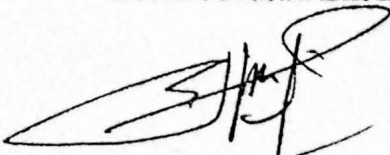
Drs. Zulkarnain Ishak, MA
NIP. 130353374

Anggota



Dr. Taufiq Marwah, M.Si
NIP. 132050493

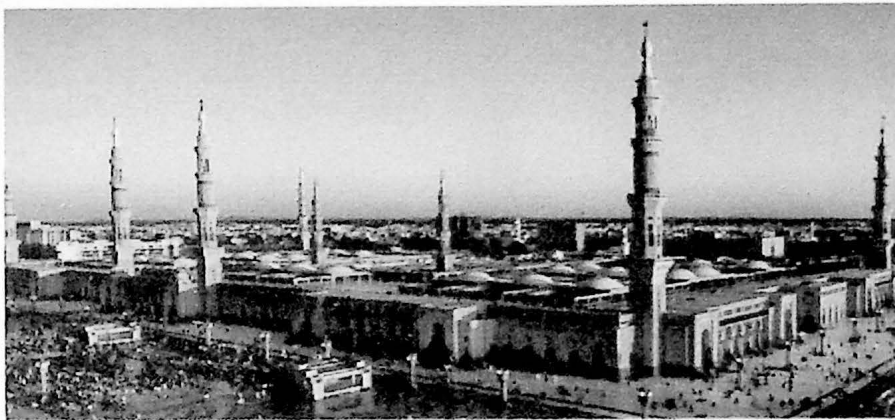
Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Drs. Suhel, M. Si
NIP. 131 993 979

Motto :

Hidup adalah perjuangan dan ibadah, kesengsaraan awal dari suatu kebahagiaan dan pengorbanan diperlukan untuk mencapai kesuksesan



Berkat Rahmat dan Ridho Allah SWT skripsi ini berhasil dibuat dan kupersembahkan kepada :

- ♥ Mama dan Papaku yang sangat aku cintai
- ♥ Adekku (Sherly Novita) yang sangat aku sayangi
- ♥ My Sweet Honey (E-en), aku sangat mencintai dan menyayangimu
- ♥ Bapak , Ibu dan Adek - adekku thanks atas bantuannya (I Love U All)
- ♥ Keluargaku di Siolo dan Jakarta. Terima kasih atas bantuannya.
- ♥ Pembimbing Skripsiku, thanks atas bimbingannya
- ♥ Buat Yudhi, A-an dan Husni. Makasih atas bantuannya
- ♥ Teman-teman di IESP ` 01.
- ♥ Dan untuk almamaterku

KATA PENGANTAR

Selain bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Sriwijaya, penulisan ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bacaan tambahan perbendaharaan pengetahuan. Terutama bagi pihak yang berkepentingan dengan hal yang dipaparkan dalam skripsi ini. Untuk menyelesaikan tulisan ini dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Palembang”. Masalah pokok yang ingin diteliti adalah pengaruh pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah.

Penulis bersyukur pada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini. Penulis sangat menyadari bahwa permasalahan serta analisa dari masalah yang dikemukakan jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangatlah diharapkan dalam memperbaiki skripsi ini. Dan untuk kemajuan pengetahuan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amiin.

Palembang, Februari 2005

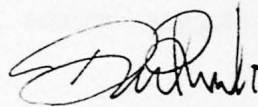
Penulis

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh data dan informasi yang disajikan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan dengan jelas sumbernya, adalah hasil penelitian dan investigasi saya sendiri dan belum pernah atau tidak sedang diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan lain atau gelar yang sama di tempat lain.

Indralaya, Februari 2005

Yang Membuat Pernyataan,



Derry Rendal

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 16 Februari 1983 di Palembang, merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Orang tua bernama Ir. Dahril dan Rosita D.

Pendidikan sekolah dasar diselesaikan pada tahun 1995 di SD Negeri 182 Palembang, sekolah menengah pertama pada tahun 1998 di SLTP Semen Padang Indarung di Padang, dan sekolah menengah umum di SMU I Banten (Serang).

Penulis diterima sebagai mahasiswa di Program Studi Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi universitas Sriwijaya pada tahun 2001 melalui Ujian masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN).

Pengalaman keorganisasian penulis adalah sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA), sebagai anggota EF ECS, sebagai anggota KINERJA.

UCAPAN TERIMA KASIH

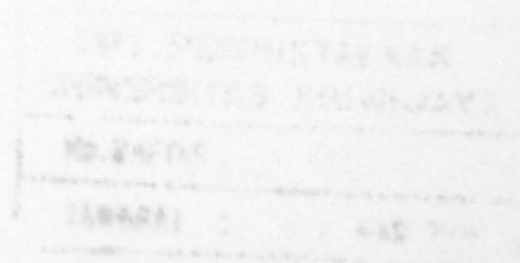
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Palembang, dalam rangka untuk menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh ujian sarjana pada Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya.

Dalam kesempatan ini penulis akan mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan yang sangat berarti bagi penyempurnaan tulisan yang sederhana ini, yakni kepada:

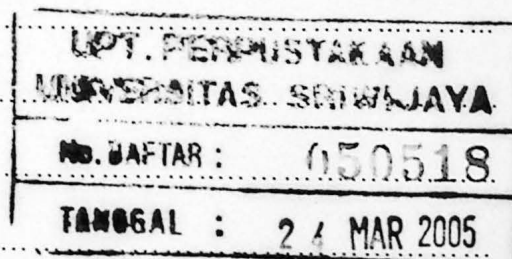
1. Yth. Bapak Prof. DR. H. Zainal Ridho Djafar. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Yth. Ibu Dra. Badia Perizade, MBA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Yth. Bapak Drs. Suhel, M. Si. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan. Terima kasih atas seluruh bantuan bapak yang telah menjadi pembimbing akademik saya, memberikan ilmu dan nasehat yang sangat berguna untuk bekal hidup saya. Saya takkan pernah melupakan budi baik bapak.

4. Yth. Ibu Dra. Saadah Yuliana, M. Si. Selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan. Terima kasih atas semua kebaikan ibu selama saya menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi.
5. Yth. Bapak Dr. Didik Susetyo, M. Si. Selaku Dosen Pembimbing I Skripsi. Terima kasih atas bantuan, ilmu, nasehat yang sangat berguna untuk saya.
6. Yth. Bapak Drs. Zulkarnain Ishak, M.A. Selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas waktunya yang telah membimbing skripsi saya hingga selesai.
7. Yth Ibu Ita. Terima kasih banyak atas bantuannya mengurus nilai saya selama saya menjadi mahasiswa Ekonomi Pembangunan.
8. Yth. Ibu Dra. Aslamawati. Bu', hanya Allah yang dapat membalas kebaikan ibu, terima kasih atas kesempatan beasiswa yang ibu berikan kepada saya.
9. Yth. Segenap karyawan dan karyawanati Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, terima kasih atas bantuan-bantuannya.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
UCAPAN TERIMA KASIH	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAKSI	xviii
ABSTRACT	xix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. 1. Latar Belakang Masalah	1
1. 2. Identifikasi Masalah	8
1. 3. Tujuan Penelitian	8



1. 4. Manfaat Penelitian	9
1. 5. Kerangka Pemikiran	9
1. 6. Metodologi Penelitian	19
1. 6. 1. Ruang Lingkup Penelitian	19
1. 6. 2. Sumber Data	19
1. 6. 3. Teknik Analisis	20
1. 6. 4. Batasan-batasan Variabel	23
BAB II. KEADAAN KOTA PALEMBANG	25
2. 1. Gambaran Umum Kota Palembang	25
2. 1. 1. Kondisi Geografis dan Luas Wilayah	25
2. 1. 2. Pemerintahan, Wilayah Administrasi dan Jumlah Penduduk	25
2. 2. Keadaan Perekonomian Kota Palembang	29
2. 2. 1. Tinjauan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palembang	29
2. 2. 2. Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang	32
2. 2. 3. Laju Inflasi Sektoral	34
2. 2. 4. Pendapatan Per Kapita	36
2. 3. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang	37
2. 4. Deskripsi Variabel Penelitian	42
2. 4. 1. Perkembangan Pajak Hotel dan Restoran Kota Palembang	42

2. 4. 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Palembang Tahun Anggaran 1993 – 2003	46
2. 4. 3. Kriteria Penetapan Golongan Kelas Rumah Makan dan Hotel di Kota Palembang	48
BAB III. ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KOTA PALEMBANG	51
3. 1. Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang	51
3. 2. Pengaruh PDRB per kapita, Laju Inflasi, Jumlah Wisatawan Asing dan Jumlah Wisatawan Domestik terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran	57
3. 2. 1. Hasil Estimasi	57
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	91
4. 1. Kesimpulan	91
4. 2. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Distribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pajak Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 1993 – 2003	7
2. Pembagian Wilayah Administrasi Kota Palembang	27
3. Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan di Kota Palembang Tahun 2003	28
4. Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1994 – 2003	33
5. Pendapatan Regional Per kapita Kota Palembang Tahun 1993 – 2003...	36
6. Ratio Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran (Pajak Pembangunan I) Kota Palembang Tahun 1993 – 2000	44
7. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Palembang Tahun 2001 – 2003	45
8. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Palembang Tahun Anggaran 1993 – 2003	46
9. Penilaian Teknis Operasional Hotel di Kota Palembang	50
10. Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang Tahun Anggaran 1993 – 2003	54
Palembang Tahun Anggaran 1993 – 2003	69
11. Persamaan dan Hasil Estimasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penerimaann Pajak hotel dan Restoran di Kota Palembang	63

DAFTAR GRAFIK

1. Distribusi Persentase PDRB Kota Palembang Atas Dasar Harga Berlaku Per Sektor (Tanpa Migas)	31
2. Laju Inflasi Kota Palembang Tahun 1994 – 2003	35
3. Perkembangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Konstan)	38
4. Pertumbuhan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 1993 – 2003	56

DAFTAR GAMBAR

1. Skema Kerangka Pemikiran 19

DAFTAR LAMPIRAN

1. PDRB Kota Palembang Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)	100
2. PDRB Kota Palembang Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)	101
3. Pembagian Nilai dan Komponen-komponen Rumah Makan/Restoran di Kota Palembang	102
4. Golongan Kelas Rumah Makan/Restoran Kota Palembang	104
5. Penilaian Teknis Operasional Hotel Berdasarkan Golongan Kelas Hotel di Kota Palembang	107

ABSTRAKSI

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh PDRB per kapita, inflasi, laju pertumbuhan PDRB, jumlah wisatawan asing dan domestik terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Palembang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data time series (data tahun 1993-2003). Analisa yang digunakan adalah regresi sederhana dan regresi berganda dengan menggunakan metode enter dan metode *backward elimination*. Dari hasil analisa tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel dan restoran ditemukan bahwa regresi linier berganda secara simultan terjadi multikolinieritas. Untuk itu dilakukan metode backward elimination dan didapat variabel laju inflasi dan PDRB per kapita berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran karena didapat nilai uji F sebesar 34,205. R yang terbaik sebesar 0,976. R^2 dan R^2 yang terbaik sebesar 0,953 dan 0,916. Uji t yang terbaik 8,239 dan 4,106.

Kata Kunci : Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran, Inflasi, PDRB per kapita, Jumlah Wisatawan Asing dan Domestik, Laju Pertumbuhan PDRB

ABSTRACT

This research conducted to find out the influence of PDRB per capita, Inflation, the growth of PDRB, foreign and domestic tourist amounts to hotel and restaurant tax revenues to Palembang city. The data used in this study consist of the secondary data (time series) (data from 1993 to 2003). Analysis tool used in this research is simple linear regression and double linear regression approach with enter and backward elimination methods. From the result of analysis about factors which influenced hotel and restaurant tax revenues found that double linear regression with simultaneous happened multicollinearity. For that done backward elimination and found that inflation variable and PDRB per capita very significant to the hotel and restaurant tax revenues because F_{test} is 34,205. Multiple product (R) is 0,976. Determinant coefficient (R^2) and R^2 which the best are 0,953 and 0,916. t test which the best are 8,239 and 4,106.

Key word : Hotel and restaurant tax revenues, Inflation, PDRB per capita, foreign and domestic tourist amounts and the growth PDRB.

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, sejak awal pembangunan sampai kini tetap memacu diri dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup bangsa dan berperan serta untuk mengurangi adanya jurang pemisah antara penduduk yang berpendapatan rendah dan yang berpendapatan tinggi.

Pembangunan nasional merupakan rangkaian usaha pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Penyelenggaraan pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan merata. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya pembangunan ekonomi. Pada dasarnya yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Sukirno, 1985 : 13).

Salah satu faktor pendorong agar kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik apabila tersedia pembiayaan yang cukup besar. Berdasarkan sumbernya, usaha pengerahan modal untuk dana pembangunan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu modal yang berasal dari dalam negeri dan modal yang berasal dari luar negeri. Modal yang berasal dari dalam negeri, dapat berupa tabungan masyarakat yang tidak

digunakan untuk konsumsi, dan tabungan pemerintah. Dana untuk pembiayaan pembangunan terutama digali dari sumber kemampuan sendiri, sedangkan dana luar negeri yang masih diperlukan hanya sebagai dana tambahan, dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan dan mencegah keterlibatan serta campur tangan pihak asing.

Salah satu azas pembangunan nasional adalah pembangunan nasional haruslah berdasarkan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, oleh karena itu segenap modal dan potensi dalam negeri haruslah dimanfaatkan, digali dan diolah menjadi kekuatan nasional yang nyata dan dapat dimobilisasi untuk mempercepat lajunya pembangunan nasional.

Sebagai akibat dari proses pembangunan tersebut, pendapatan pemerintah akan mengalami kenaikan sedangkan dalam waktu yang sama pengeluaran pemerintah akan bertambah. Maksudnya kas pemerintah akan bertambah apabila tingkat pertambahan penerimaan lebih besar daripada tingkat pengeluaran (Sukirno, 1985 : 357).

Sejalan dengan semakin maju dan berkembangnya masyarakat, serta semakin bertambahnya jumlah penduduk serta semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat, maka kegiatan dan pengeluaran pemerintah juga menunjukkan angka yang semakin meningkat.. Keadaan seperti ini telah lama diteliti kemudian dikemukakan oleh seorang ahli ekonomi politik Jerman, Adolf Wagner (1835-1915) dalam teorinya yang terkenal dengan "*Hukum semakin meningkatnya kegiatan Pemerintah/Negara*" (Sutrisno, 1984 : 364).

Menurutnya dengan semakin meningkatnya kegiatan pemerintah berarti semakin meningkat pula pengeluaran pemerintah guna membiayai kegiatan-kegiatan yang semakin bertambah tersebut. Untuk membiayai pengeluaran yang semakin bertambah itu maka diperlukan peningkatan dari sektor penerimaan pemerintah.

Sektor perpajakan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam usaha meningkatkan penerimaan negara, baik itu dari pajak langsung (*direct tax*) maupun pajak tidak langsung (*indirect tax*). Pajak adalah suatu pungutan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam bentuk Undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya untuk membiayai kegiatan pemerintah (Sutrisno, 1986 : 120).

Upaya untuk meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor pajak, pemerintah telah melaksanakan pembahasan sistem perpajakan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan nasional. Seluruh Undang-undang pajak yang berlaku sebelumnya diganti dengan Undang-undang pajak yang baru secara keseluruhan. Undang-undang pajak yang baru lebih mencerminkan keadilan dan kepastian hukum, melalui perluasan basis pengenalan pajak dan menyederhanakan seluruh sistem pajak. Selain itu Undang-undang pajak yang baru menganut prinsip "*Self Assesment*" bahwa wajib pajak diberikan tanggung jawab yang lebih besar untuk menghitung, menyetor, dan melapor kewajiban pajaknya. Aparat pajak dalam hal ini, hanya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pajaknya (Bawazier, 1994 : 52).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2 ada dua jenis pajak. Pertama, pajak propinsi, terdiri dari :

a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Kedua, jenis pajak kabupaten/kota, terdiri dari : a) Pajak Hotel, b) Pajak Restoran, c) Pajak Hiburan, d) Pajak Reklame, e) Pajak Penerangan Jalan, f) Pajak Pengambilan Bahan Bakar Galian C, g) Pajak Parkir (Liliawati, 2001 : 7 – 8).

Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas pada tulisan ini, maka untuk selanjutnya dari unsur-unsur pendapatan asli daerah yang disebutkan di atas hanya pajak daerah yang akan dibahas lebih mendalam.

Jenis pajak propinsi bersifat limitatif yang berarti propinsi tidak dapat memungut pajak lain selain yang telah ditetapkan, dan hanya dapat menambah jenis retribusi lainnya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota tidak bersifat limitatif, artinya kabupaten/kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya (Sidik, 2002 : 5). Selain yang ditetapkan secara eksplisit dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, dengan menetapkan sendiri jenis pajak yang bersifat spesifik dengan memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan dalam Undang-undang tersebut. Kriteria yang dimaksud adalah (Sidik, 2002 : 6) : Pertama, Bersifat pajak dan bukan retribusi. Kedua, Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Ketiga, Objek pajak

bukan merupakan objek pajak propinsi dan/atau objek pajak pusat. Keempat, Potensinya memadai. Kelima, Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Keenam, Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. dan Ketujuh, Menjaga kelestarian lingkungan.

Dari dua jenis pajak di atas yaitu pajak propinsi dan pajak kabupaten, maka pembahasan akan mengkhususkan pada pajak kabupaten/kota, khususnya pajak hotel dan restoran yang terdapat di wilayah Kota Palembang, karena pajak hotel dan restoran merupakan pajak yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD Kota Palembang setelah pajak penerangan jalan.

Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah Kota Palembang sebelum tahun anggaran 1998/1999 ada 12 jenis yaitu pajak potong hewan, pajak pembangunan I, pajak radio, pajak bangsa asing, pajak atas pertunjukan dan keramaian, pajak reklame, pajak anjing, pajak penjualan minuman alkohol, pajak kendaraan tidak bermotor, pajak penerangan jalan, pajak rumah bola, serta pajak pendaftaran perusahaan.

Kemudian mulai tahun anggaran 1998/1999 berkurang menjadi 6 jenis pajak yaitu: pajak pembangunan I yang kemudian diganti namanya menjadi pajak hotel dan restoran, pajak atas pertunjukan dan keramaian yang mengalami perubahan nama menjadi pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengolahan bahan galian golongan C, serta pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Pajak penerangan jalan yang memberikan kontribusi cukup besar serta pajak restoran pada urutan kedua sedangkan pajak hotel pada urutan ketiga dibandingkan dengan jenis pajak lainnya, dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan.

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/ atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau *catering*. Pajak hotel dan restoran mempengaruhi pajak daerah yang berhubungan dengan PDRB per kapita, inflasi, dan laju pertumbuhan PDRB. Besarnya penerimaan terhadap pajak hotel dan restoran dipengaruhi oleh jumlah wisatawan asing dan domestik.

PDRB per kapita adalah produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di propinsi Sumatera Selatan 1 (satu) tahun dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut (Bamim, 2002 : 115). Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian (Sukirno, 1999 : 15). Wisatawan adalah orang yang memasuki wilayah negara asing dengan tujuan apapun asal bukan untuk tinggal menetap atau melakukan usaha yang teratur dan mengeluarkan uangnya di negara yang dikunjungi serta tidak memperoleh uang dari negara tersebut (Sulastiyono, 1999 : 4 – 5). Laju Pertumbuhan PDRB adalah proses meningkatnya produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di propinsi Sumatera Selatan dalam satu tahun. Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Palembang tahun anggaran 1993–2003 dapat dilihat pada Tabel 1. 1.

Tabel 1. 1
Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pajak Daerah Kota Palembang
Tahun Anggaran 1993 – 2003

Tahun	Pajak Pembangunan I (Rupiah)	Pajak Hotel (Rupiah)	Pajak Restoran (Rupiah)	Pajak Daerah (Rupiah)	Kontribusi (%)
1992/1993	1.287.109.898,71	-	-	4.521.256.724,36	28,47
1993/1994	1.703.923.971,92	-	-	5.168.457.181,42	32,97
1994/1995	1.777.999.603,00	-	-	5.914.522.910,00	30,06
1995/1996	2.229.390.583,90	-	-	7.488.548.357,90	29,77
1996/1997	3.279.512.018,00	-	-	8.043.109.346,00	40,77
1997/1998	3.104.873.843,00	-	-	8.550.450.017,00	36,31
1998/1999	2.712.160.574,00	-	-	10.499.622.057,50	25,83
1999/2000	3.177.451.115,00	-	-	13.404.281.029,25	23,70
2001	-	1.981.659.221,50	3.422.931.571,00	17.601.879.447,50	30,70
2002	-	2.291.614.485,00	4.276.700.445,00	22.602.772.720,00	29,05
2003	-	2.764.373.478,00	5.012.495.124,00	26.036.154.076,25	29,87
Rata-rata	2.409.052.701,00	2.345.882.395,00	4.237.375.713,00	11.802.823.078,79	30,69

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Dari Tabel 1. 1 dapat diambil kesimpulan bahwa kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah rata-rata mencapai 30,69 persen setiap tahun anggaran. Pada tahun anggaran 1996/1997 mencapai Rp. 3.279.512.018,00 atau sekitar 40,77 persen dari total penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 8.043.109.346,00. Sumbangan terkecil terjadi pada tahun anggaran 1999/2000 dengan total penerimaan sebesar Rp. 3.177.451.115,00 dari seluruh penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 13.404.281.029,25 atau sekitar 23,70 persen.

Dilihat dari kontribusi diatas dan didukung dengan teori yang ada, maka pajak hotel dan restoran mempunyai prospek yang bagus untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang setelah pajak penerangan jalan, karena hotel dan restoran di Kota Palembang semakin banyak yang berkembang, sehingga berdampak pada peningkatan hasil pajak dari hotel dan restoran tersebut (Dinas Pariwisata Kota Palembang). Oleh karena itu masalah yang utama yang akan diteliti adalah faktor-faktor apakah yang mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Palembang.

1. 2. Identifikasi masalah

Masalah penelitian adalah seberapa besar pengaruh faktor-faktor PDRB per kapita, Laju Inflasi yang merupakan proksi dari tarif, Jumlah Wisatawan Asing dan Domestik serta Laju Pertumbuhan PDRB terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Palembang.

1. 3. Tujuan Penelitian

Penulisan ini dimaksudkan untuk mencari jawaban dari masalah yang ada, sehingga dapat memperoleh gambaran yang jelas. Secara umum penulisan ini bertujuan untuk menganalisis berapa besar faktor-faktor PDRB per kapita, Laju Inflasi, Jumlah Wisatawan Asing dan Domestik serta Laju Pertumbuhan PDRB mempengaruhi besarnya penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Palembang.

1. 4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan dan informasi yang berguna bagi pemerintah daerah Kota Palembang agar dapat mengintensifkan penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Palembang.
2. Memberikan sumbangan pemikiran dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Palembang.

1. 5. Kerangka Pemikiran

Peranan Pemerintah Dalam Perekonomian

Menurut Dumairy (1997 : 25) di negara manapun selalu ada campur tangan atau intervensi pemerintah dalam perekonomian. Tidak ada pemerintah dalam pencatutan ekonomi negerinya berperan hanya semata-mata sebagai *wasit* atau *polisi* yang hanya berfungsi membuat Undang-undang atau peraturan, untuk kemudian menjadi peleraai jika timbul masalah atau penyelamat jika terjadi kepanikan, termasuk di negara-negara kapitalis.

Selanjutnya dalam kancan perekonomian modern, peranan pemerintah dapat dibedakan menjadi empat macam (Bamim, S. 2002 : 110) yaitu : Pertama, *Peran alokatif*, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi. Kedua, *Peran*

distributive, yakni pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar. Ketiga, *Peran stabilisatif*, yakni pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan *disequilibrium*. Keempat *Peran dinamisatif*, yakni pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.

Pajak Sebagai Salah Satu Penerimaan Negara

Setiap negara membutuhkan dana, untuk menyelenggarakan pemerintahan. Salah satu sumber dana yang lebih diandalkan pemerintah Indonesia adalah pajak. Pajak menurut Rochmat Soemitro adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Chairul, 1992 : 1).

Selain itu pajak juga berarti pungutan yang merupakan hak *prerogatif* atau hak istimewa yang diberikan oleh Presiden misalnya memberikan tanda jasa, amnesti, grasi, dan sebagainya. Pungutan tersebut didasarkan pada Undang-undang. Pihak-pihak yang membayar suatu jenis pajak tertentu adalah orang atau badan yang menjadi wajib pajak. Pemerintah dapat menetapkan berbagai jenis pajak dan tarif yang dapat bervariasi, antara lain disebabkan adanya perbedaan pada aspek teknis.

Ditinjau secara *mikro ekonomi*, pajak merupakan peralihan uang (harta) dari sektor swasta individu ke sektor pemerintah tanpa ada imbalan jasa secara langsung.

Pajak mengurangi pendapatan seseorang dan sudah barang tentu mengurangi daya beli individu, sehingga pajak dapat mengubah konsumsi dan pola hidup individu. Dari sisi *makro*, pajak merupakan penerimaan negara dan digunakan untuk membiayai kepentingan masyarakat sehingga memberi dampak yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat. Pajak dapat mempengaruhi harga barang-barang di pasar dan sistem pengupahan, penganggaran dan sebagainya. Jenis pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan yang merupakan keperluan publik.

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah adalah iuran yang dapat dipaksakan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung (Suparmoko, 2001 : 61).

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak daerah dapat diikhtisarkan sebagai berikut (Riwu Kaho, 2002 : 131) : (a) Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah, (b) Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-undang, (c) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang-undang dan/atau peraturan hukum lainnya, (d) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Beberapa indikator ekonomi yang digunakan dalam kaitannya dengan Penerimaan Pajak Daerah antara lain PDRB, Inflasi, Jumlah Hotel dan Restoran, Jumlah Wisatawan Asing dan Domestik, Luas Wilayah (Bamim, 2002 : 111).

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Meskipun bukan merupakan satu-satunya ukuran untuk menilai prestasi ekonomi suatu daerah, namun cukup *representatif* dan sangat lazim digunakan. PDRB bukan hanya berguna untuk menilai pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari waktu ke waktu, tapi juga membandingkannya dengan daerah lain. Bila Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat dari tahun ke tahun (*ceteris paribus*), akan menyebabkan meningkatnya pendapatan per kapita, tingginya nilai pendapatan per kapita mencerminkan kesejahteraan suatu daerah semakin baik, sehingga pajak yang akan diterima suatu daerah juga akan meningkat (Bamim, 2002 : 112).

Menurut *Adam Smith* bahwa dalam sistem perpajakan pada umumnya ada empat aturan (*Smith's cannons*) (Sutrisno, 1986 : 4) yaitu : Pertama, Azas Keadilan (*Ability to Pay*) artinya beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Kedua, Azas Kepastian (*Certainly*) artinya pajak hendaknya tegas, jelas dan pasti bagi setiap wajib pajak sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan juga akan memudahkan administrasi pemerintahan sendiri. Ketiga, Azas Kesenangan (*Convenience*) artinya pajak jangan sampai terlalu menekan si wajib pajak sehingga wajib pajak akan dengan senang hati melakukan pembayaran kepada pemerintah. Keempat, Azas Penghematan

(*Economic*) artinya pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal dalam arti jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar daripada jumlah penerimaan pajaknya.

Dasar pembenaran (*Justification*) hal dari negara untuk memungut pajak dari rakyatnya adalah teori-teori sebagai berikut (Mardiasmo, 2000 : 3): Pertama, Teori Asuransi, bahwa negara dalam melaksanakan tugasnya, mencakup pula tugas melindungi jiwa raga dan harta benda perseorangan. Oleh sebab itu negara bekerja sebagai perusahaan asuransi. Untuk perlindungan itu warga negara membayar premi, dan dalam bentuk negara maka pajaklah yang dapat dipandang sebagai premi itu. Kedua, Teori Kepentingan, bahwa pajak itu mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. Makin banyak individu mengenyam atau menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, makin besar pula pajaknya.

Ketiga, Teori Daya Pikul, adalah teori ini mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari si wajib pajak (individu-individu), jadi tekanan semua pajak-pajak harus sesuai dengan daya pikul si wajib pajak dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran belanja si wajib pajak tersebut.

Menurut W. J. de Langen : *Daya pikul* adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan yang mutlak kebutuhan yang primer (biaya hidup yang sangat mendasar). Keempat, Teori Daya Beli merupakan teori modern, ia tidak mempersoalkan asal mulanya negara memungut pajak melainkan banyak melihat kepada "Efeknya" dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini maka fungsi pemungutan

pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat, dapat disamakan dengan *pompa* yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu.

Sementara *Musgrave* mengemukakan ada enam persyaratan bagi suatu struktur perpajakan yang baik. Adapun persyaratan tersebut meliputi (Sutrisno, 1986 : 7) : Pertama, Distribusi beban pajak adil (*equitable*). Dalam distribusi, beban pajak hendaknya bersifat *faire share* untuk setiap orangnya. Kedua, Pengenaan pajak hendaknya yang sedikit mungkin mencampuri keputusan ekonomik seseorang dalam menuju pada pasar yang efisien. Ketiga, Apabila kebijaksanaan perpajakan digunakan untuk mencapai tujuan lain, hendaknya diusahakan seminimal mungkin untuk mencapai keadilan. Keempat, Struktur perpajakan hendaknya disusun dan diusahakan agar administrasi bersifat objektif dan tidak acak-acakan sehingga mudah dimengerti oleh setiap pembayar pajak. Kelima, Struktur perpajakan hendaknya disusun dan diusahakan sedemikian rupa sehingga kebijaksanaan fiskal yang digunakan untuk mencapai tujuan stabilisasi dan tujuan pertumbuhan dapat dengan mudah dilaksanakan. Keenam, Tujuan lainnya ongkos administrasi penetapan pajak hendaknya diusahakan serendah-rendahnya.

Ciri-ciri pajak yang ditetapkan di Indonesia ada 5 yaitu : (1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang dan Aturan Pelaksananya, (2) Tidak dapat ditunjuk adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah, (3) Dipungut oleh pemerintah pusat dan daerah, (4) Digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah bila terdapat

surplus digunakan untuk publik investment, (5) Punya tujuan reguleren (mengatur) selain fungsi budgetair (Mardiasmo, 2000 : 1).

Sistem Pemungutan Pajak (Mardiasmo, 2000 : 7-8) yaitu : Pertama, *Official Assesment System* yaitu pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada *viscus* untuk menentukan besarnya pajak terhutang. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada *viscus*, wajib pajak bersifat pasif, hutang pajak timbul setelah dikeluarkan ketetapan pajak oleh *viscus*.

Kedua, *Self Assesment System* yaitu memberikan wewenang kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk memperhitungkan atau memungut, membayar dan melapor sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Ketiga, *With Holding Assesment System* yaitu memberikan wewenang pada pihak ke-3 untuk memotong, memungut besarnya terhutang oleh wajib pajak.

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/ atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/ atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau *catering* (Liliawati, 2001 : 23).

Objek pajak hotel dan restoran adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel dan atau restoran. Termasuk dalam obyek pajak hotel dan restoran adalah (Suparmoko, 2001 : 66-67) : Pertama, Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal

jangka pendek. Kedua, Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang memberikan kemudahan dan kenyamanan. Ketiga, Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel. Keempat, Jasa persewaan maupun untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Subyek pajak hotel dan restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atau pelayanan hotel dan/atau restoran, sedangkan wajib pajak hotel dan restoran adalah orang atau badan yang mengusahakan hotel dan restoran. Dasar pajak hotel dan restoran adalah jumlah pembayaran tamu kepada hotel dan/atau restoran. Tapi tarif pajak hotel dan restoran paling tinggi adalah 10 persen dari nilai-nilai pembayaran tersebut (Suparmoko, 2001 : 67).

Menurut Hamdan Aini, 1985, azas pemungutan pajak adalah : (a) Azas wilayah (*teritorial*) yaitu pemungutan pajak didasarkan atas domisili, dimana seseorang bertempat tinggal, (b) Azas kebangsaan (*Nasionalisme*) yaitu dimanapun seseorang berada dapat ditunjuk sebagai wajib pajak, apakah di dalam negeri atau di luar negeri, (c) Azas sumber yaitu pemungutan pajak didasarkan pada adanya suatu sumber negara. Negara yang berhak memungut pajak adalah negara dimana sumber itu berada.

Pengaruh pemungutan suatu pajak tertentu bagi wajib pajak dapat menimbulkan respon (Sutrisno, 1984 : 363) : (1) Wajib pajak berusaha untuk menghindari diri dari membayar pajak secara illegal, (2) Wajib pajak berusaha untuk mengkompensasi beban pajak dengan bekerja atau berusaha lebih keras, termasuk memperluas produksi dan penjualan, (3) Wajib pajak berusaha memindahkan beban pajak baik ke depan maupun ke belakang. Ke depan dengan cara meningkatkan output dan ke belakang dengan

berusaha menurunkan pembelian harga input, (4) Apabila ketiga reaksi tersebut tidak ada, maka wajib pajak akan menanggung sendiri beban pajak.

Secara garis besar jenis pajak yang dipungut pemerintah dapat dibedakan kepada dua golongan, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung berarti pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, misalnya : Pajak Penghasilan. Sedangkan pajak tidak langsung berarti pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, misalnya : Pajak Pertambahan Nilai (Mardiasmo, 2000 : 8).

Penelitian Sebelumnya

Dalam penelitian sebelumnya mengenai Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Propinsi Sumatera Selatan (Studi Kasus Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) oleh Selamat Bamim, 2002 digunakan model analisis sebagai berikut :

$$\log Y = \beta_0 + \beta_1 \log X_1 + \beta_2 \log X_2 + \beta_3 \log X_3 + \beta_4 \log X_4 + \beta_5 \log X_5 + e_i$$

Dimana :

Y = Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor

X_1 = PDRB

X_2 = Inflasi

X_3 = Jumlah Penduduk

X_4 = Jumlah Kendaraan Bermotor

X_5 = Dummy Variabel

β_0 = Intercep konstan

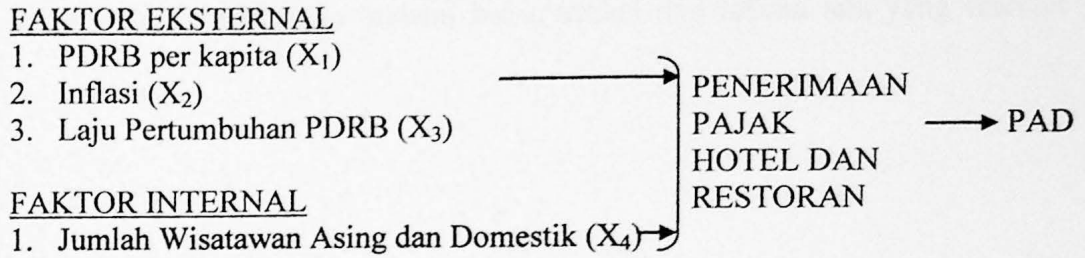
$\beta_1 - \beta_5$ = Parameter regresi dari variabel yang diamati

e_i = variabel pengganggu yang tidak dimasukkan dalam model

Berdasarkan persamaan tersebut dikemukakan bahwa PDRB, inflasi, jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk dan dummy variabel secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Propinsi Sumatera selatan.

Skema Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka teoritis yang telah dikemukakan dapat disederhanakan dalam bentuk kerangka pikir sebagai berikut :



Gambar 1. 1. Skema Kerangka Pemikiran

Hipotesis

Berdasarkan uraian tinjauan pustaka di atas, maka hipotesis penelitian sebagai berikut : Faktor-faktor PDRB per kapita, Laju Inflasi, Jumlah Wisatawan Asing dan Domestik, Laju Pertumbuhan PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Palembang.

1. 6. Metode Penelitian

1. 6. 1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian difokuskan pada hotel dan restoran yang berada di Kota Palembang. Cakupan dari penelitian diambil dengan alasan bahwa penulis akan lebih mampu mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi penulisan skripsi ini.

1. 6. 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari berbagai sumber diantaranya Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Sumatera Selatan, Dinas Pariwisata Kota Palembang. Selain itu

dilakukan pula studi kepustakaan melalui buku, artikel dan tulisan lain yang relevan dengan permasalahan.

1. 6. 3. Teknik Analisis

Dalam menganalisis permasalahan yang ada, penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu analisis *kualitatif* dan *kuantitatif*. Analisis *kualitatif* lebih bersifat deskriptif dan digunakan untuk menjelaskan angka-angka baik dari hasil perhitungan maupun dari tabel yang ada. Teknis analisa *kuantitatif* adalah menganalisa data dengan menggunakan model analisis regresi atau matematis serta uji dengan menggunakan metode statistika untuk kemudian ditarik kesimpulan (Santoso, 2000 : 4 – 5).

Adapun metode analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisa berganda, karena variabel yang digunakan lebih dari dua variabel, dimana setiap persamaan terdiri dari 1 variabel dependent dan 4 variabel independent. Hasil perhitungan diuji satu per satu karena terjadi gejala autokorelasi, multikolinieritas dan heterokedastisitas, maka dilakukan metode backward elimination.

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \mu$$

Dimana :

Y_i = Variabel dependen (variabel tidak bebas) yang dipengaruhi oleh variabel bebas, pada analisis ini variabel tidak bebas adalah Pajak Hotel dan Restoran di Kota Palembang

β_0 = Bilangan konstan (Konstanta)

$\beta_{1...4}$ = Koefisien regresi

X_1 = PDRB per kapita (Konstan)

X_2 = Laju Inflasi

X_3 = Laju Pertumbuhan PDRB (Konstan)

X_4 = Jumlah Wisatawan Asing dan Domestik

μ = Kesalahan pengganggu yang disebabkan faktor lain

Setelah perhitungan akan dilakukan uji statistik dengan menggunakan pengujian secara parsial dan simultan. Pertama, pengujian secara parsial menggunakan uji t yaitu pengujian tingkat signifikan masing-masing koefisien regresi yang diperoleh dari perhitungan. Uji t menggunakan kriteria sebagai berikut :

- a. H_0 diterima bila $-t_{\alpha/2 \text{ tabel}} < t_{\alpha/2 \text{ hitung}} < t_{\alpha/2}$, H_a ditolak
- b. H_0 ditolak bila $-t_{\alpha/2 \text{ tabel}} > t_{\alpha/2 \text{ hitung}} > t_{\alpha/2}$, H_a diterima

Kedua, pengujian secara simultan menggunakan uji F yaitu menguji semua koefisien penaksir secara serentak. Pengujian uji-F dengan menggunakan kriteria sebagai berikut (Zuryeni, 2003 : 5) :

- a. Ho ditolak apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, Ha diterima
- b. Ho diterima apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, Ha ditolak

Pengujian tingkat signifikan masing-masing koefisien variabel bebas dimulai dengan mengajukan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1). Hipotesis tersebut dapat ditulis sebagai berikut :

$$H_0 : \beta = 0$$

$$H_1 : \beta \neq 0$$

Dengan menggunakan test dua sisi pada tingkat signifikan dan derajat kebebasan tertentu, maka kesimpulan yang diambil dapat mengarah kepada kriteria uji t dan uji F yaitu apabila nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} Ho ditolak artinya variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat (signifikan). Sedangkan jika nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} Ho diterima artinya variabel bebas tidak berpengaruh secara statistik terhadap variabel terikat (tidak signifikan). Sedangkan apabila nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} maka Ho ditolak artinya variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat (signifikan). Jika F_{hitung} lebih kecil daripada F_{tabel} maka Ho diterima artinya variabel bebas tidak berpengaruh secara statistik terhadap variabel terikat (tidak signifikan).

Perhitungan t_{tabel} berdasarkan *level of significant* (α) adalah 5 persen, yang artinya tingkat kesalahan suatu variabel adalah 5 persen atau 0,05 persen. Sedangkan

tingkat keyakinan adalah 95 persen atau 0,95 persen. Jadi apabila tingkat kesalahan suatu variabel lebih dari 5 persen, berarti variabel tersebut tidak signifikan. Semua ini akan dibahas dengan bantuan program SPSS.

1. 6. 4. Batasan-batasan Variabel

Untuk memudahkan dalam memahami dan menganalisis skripsi ini, juga agar tidak terjadi kesalahan dalam menginterpretasikannya, maka penulis mempunyai batasan-batasan variabel sebagai berikut:

- a. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/ atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
- b. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/ atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau *catering*.
- c. PDRB per kapita adalah produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di propinsi Sumatera Selatan 1 (satu) tahun dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut (Bamim, 2002 : 115).
- d. Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian (Sukirno, 1999 : 15).

- e. Wisatawan adalah orang yang memasuki wilayah negara asing dengan tujuan apapun asal bukan untuk tinggal menetap atau melakukan usaha yang teratur dan mengeluarkan uangnya di negara yang dikunjungi serta tidak memperoleh uang dari negara tersebut (Sulastiyono, 1999 : 4 – 5).
- f. Laju Pertumbuhan PDRB adalah proses meningkatnya produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di propinsi Sumatera Selatan dalam satu tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini H Hamdan. 1991. *Perpajakan*. Bumi Aksara. Cet 2. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. *Palembang Dalam Angka 1993 - 2003*. BPS. Sumatera Selatan.
- Badan Pusat Statistik. *Produk Domestik Regional Bruto 1993 - 2003*. BPS. Sumatera Selatan.
- Bamim S. 2002. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Studi kasus Penerimaan kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)*. Jurnal Kajian Ekonomi. Vol 1. Nomor 1. Program Studi Ilmu Ekonomi PPS Unsri.
- Bawazier Fuad. 1994. *Strategi penerimaan Pajak di Indonesia, memasuki PJP II*, Makalah Diskusi Panel Perpajakan. Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
- Chairul Tubagus. 1992. *Perpajakan*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. *Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang 1993 - 2003*.
- Dinas Pariwisata Kota Palembang. *Hotel dan Restoran di Kota Palembang. 2002 - 2004*.
- Djalal Nachrowi, Usman Hardius. 2002. *Penggunaan Teknik Ekonometri*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Cetakan 1. Edisi 1.
- Ismail Munawar. 2001. *Pendapatan Asli Daerah dalam Otonomi Daerah*. Jurnal TEMA. Vol II No. 1. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. 2002. *Penetapan Golongan Kelas Hotel dan Restoran di Kota Palembang*. Hal. 38-39
- Liliawati Eugenia M. 2001. *Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT Harvindo. Jakarta.
- Lipsey, Richard, et. al. 1997. *Economics 10th ed 1993*. Penerbit Harper and Row.
- Mardiasmo. 2000. *Perpajakan*. Penerbit Andy. Yogyakarta. Edisi Revisi.

- Nilawati Umi. 2003. *Pengaruh Realisasi Pajak Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jurnal Fordema Vol 3 No. 2. Hal 555 – 565. Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang.
- Riwu Josef Kaho. 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Edisi I. Cetakan 6.
- Santoso Singgih. 2000. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta. Cetakan 1.
- Santoso Singgih. 1999. *SPSS Versi 7.5*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta. Cetakan 1.
- Sidik Machfud. 2002 . *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*. Artikel. STIA LAN Bandung.
- Sukirno Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan : Proses Masalah dan Dasar Kebijakan*. LPFE – UI. Jakarta. hal 13.
- Sukirno Sadono. 1999. *Pengantar Teori Makroekonomi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Edisi 2. Cetakan 10.
- Sulastiyono Agus. 1999. *Manajemen Pengelolaan Hotel dan Restoran*. Penerbit Alfabeta Bandung. Cetakan Pertama.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1993. *Ekonometrika Pengantar*. Penerbit BPFE Yogyakarta.
- Suparmoko M. 2001. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Edisi Pertama. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Susilo. 2000. *Sebuah Resep dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pendekatan Metode Zopp*. Jurnal Lintasan Ekonomi. Volume XVII. Nomor 1. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Sutrisno.PH. 1984. *Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara*. LPFE – UGM. Yogyakarta. Cetakan ketiga. Hal 364.
- Sutrisno PH. 1986. *Ekonomi Publik I*. Karunika – UT. Jakarta.
- Sutrisno PH. 1986. *Ekonomi Publik II*. Karunika – UT. Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. BP. Panca Usaha. Jakarta. 2001.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. BP. Panca Usaha. Jakarta. 2001.

Widodo Hg Suseno. 1990. *Indikator Ekonomi : Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*. Kanisius. Yogyakarta. hal 20.

Zuryeni. 2003. *Produksi pada Industri Kecap di Kota Palembang*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 1 Nomor 1. Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unsri.